

INTISARI

Analisis Kebijakan Terkait Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana (Kasus di Pesisir Utara Kabupaten Brebes)

IPPC (2007) menyatakan bahwa pemanasan global dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan badai tropis, perubahan pola presipitasi dan perubahan angin yang dapat mempengaruhi perubahan iklim. Sedangkan perubahan iklim merupakan ancaman yang sangat serius terhadap berbagai sektor kehidupan (Kusumasari, 2015). Kabupaten Brebes menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami dampak perubahan iklim berupa, abrasi dan banjir pasang yang terus terjadi sampai saat ini. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi kedua masalah tersebut menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi kebijakan terkait adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana di Kabupaten Brebes. (2) melakukan pemetaan dan peran *stakeholder* terkait adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana di Kabupaten Brebes. (3) melakukan analisa implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengembangan kawasan pesisir tangguh Kabupaten Brebes terkait adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.

Penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam dan inventarisasi dokumen kebijakan terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kebijakan yang dominan dilaksanakan dengan cara non struktural dengan pendekatan sosial, ekonomi dan ekologi. Hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran dibandingkan dilaksanakan dengan cara struktural dengan pendekatan teknik. Sedangkan berdasarkan penanggulangan bencana yang dominan dilaksanakan adalah kebijakan penanggulangan pra bencana untuk mitigasi bencana, dibandingkan dengan tanggap darurat dan pasca bencana. Disisi lain, *stakeholder* yang berperan dalam kebijakan dan sangat dibutuhkan adalah yang terlibat secara langsung dibandingkan dengan *stakeholder* yang terlibat secara tidak langsung. Keterlibatan *stakeholder* dengan kategori PIL memberikan dampak : 1) peningkatan efektifitas, 2) peningkatan efisiensi, 3) peningkatan kecukupan, 4) peningkatan pemerataan, 5) peningkatan responsivitas dan 6) peningkatan ketepatan dalam implementasi kebijakan. Pada konteks analisa implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengembangan kawasan pesisir tangguh di Kabupaten Brebes ada yang terimplementasi dengan sangat baik yaitu di Desa Kaliwlingi dan ada yang terimplementasi dengan baik yaitu di Desa Sawojajar. Pada akhirnya dengan terimplementasinya kebijakan terkait adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana dapat mengurangi resiko bencana yang disebabkan oleh abrasi dan banjir pasang di pesisir utara Kabupaten Brebes.

Kata Kunci : Abrasi, Banjir Pasang, Kebijakan Pemerintah, *Stakeholder*, Pesisir Utara Kabupaten Brebes.

ABSTRACT

Policy Analysis Regarding Climate Change Adaptation and Disaster Mitigation (Case in North Coast of Brebes Regency)

IPPC (2007) states that global warming can cause significant changes in physical and biological systems such as increased tropical storms, changes in precipitation patterns and changes in wind that can affect climate change. While climate change is a very serious threat to various sectors of life (Kusumasari, 2015). Brebes Regency is one of the regions in Indonesia that has experienced the effects of climate change in the form of abrasion and tidal flooding that continues to occur today. How do government policies in overcoming these two problems become questions in this study. The objectives of this study are (1) to identify policies related to climate change adaptation and disaster mitigation in Brebes Regency. (2) mapping and role of stakeholders related to climate change adaptation and disaster mitigation in Brebes Regency. (3) analyzing the implementation of government policies towards the development of resilient coastal areas of Brebes in relation to climate change adaptation and disaster mitigation.

This research was conducted in a qualitative way by collecting data through observation, in-depth interviews and inventory of related policy documents. The results of this research show that the dominant policy is carried out in a non-structural manner with social, economic and ecological approaches. This is done because budget constraints are compared to being carried out in a structural manner with a technical approach. While based on the dominant disaster management implemented is a pre-disaster response policy for disaster mitigation, compared to emergency response and post-disaster. On the other hand, stakeholders who play a role in policy and are urgently needed are those who are directly involved compared to indirectly involved stakeholders. The involvement of stakeholders in the PIL category has an impact: 1) increasing effectiveness, 2) increasing efficiency, 3) increasing adequacy, 4) increasing equity, 5) increasing responsiveness and 6) increasing the accuracy in implementing policies. In the context of analyzing the implementation of government policies on the development of resilient coastal areas in Brebes, there are those that are implemented very well, namely in Kaliwlingi Village and there are well implemented ones in Sawojajar Village. In the end, the implementation of policies related to climate change adaptation and disaster mitigation could reduce the risk of disasters caused by abrasion and tidal flooding on the northern coast of Brebes Regency.

Keywords: Abrasion, Tidal Flood, Government Policy, Stakeholders, North Coast of Brebes Regency.